

Ringkasan

Semenjak diterapkannya desentralisasi pada tahun 1999, Indonesia juga menerapkan desentralisasi pendidikan dengan menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai acuan untuk mengelola sekolah. MBS juga diterapkan pada sekolah penyelenggara inklusi sebagai acuan pengelolaan sekolah, seperti di SDN 5 Arcawinangun. Namun pelaksanaannya tak terlepas dari beberapa kendala. Kendala yang dialami yaitu belum tersedianya guru pendamping dengan lulusan PGLB maupun psikolog, pelatihan guru pendamping khusus yang masih minim dilakukan, serta penyediaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah. Kendala yang dialami menyebabkan kebutuhan peserta didik khususnya peserta didik berkebutuhan khusus belum terpenuhi secara maksimal.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pendidikan inklusi di Kabupaten Banyumas, khususnya di SD Negeri 5 Arcawinangun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN 5 Arcawinangun adalah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi dan dijadikan sekolah percontohan sejak tahun 2011. Dalam pelaksanaannya apabila dikaitkan dengan perspektif MBS telah cukup baik serta patuh dengan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan manajemen pendidikan inklusi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 terdiri dari 15 pasal; Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 421/ 149/ 2011, serta Keputusan Kepala Dinas (Protap Inklusi) terkait inklusi. Selain itu, terdapat peran masyarakat dan orang tua yang sangat mendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 5 Arcawinangun. Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 5 Arcawinangun masih mengalami beberapa kendala yakni terkait tenaga kependidikan dan sarana prasarana pendidikan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang berdampak pada kebutuhan peserta didik khususnya peserta didik berkebutuhan khusus belum terpenuhi secara maksimal.

Kata Kunci: manajemen, pendidikan inklusi, abk

SUMMARY

Since the implementation of decentralization in 1999, Indonesia also implemented decentralization of education using School-Based Management (SBM) as a reference for managing schools. This also applied to inclusive schools as a reference for school management, such as SDN 5 Arcawinangun. But, there were obstacles in the implementation of inclusive education, namely the unavailability of teacher with PGLB graduates and psychologists, the lacks of training program for teacher, also the provision of facilities and infrastructure has not fully met the needs of children with special needs. These obstacles have caused the needs of students, have not been fulfilled optimally.

The research aims to identify and describe the implementation of inclusive education management in Banyumas Regency, especially in SDN 5 Arcawinangun. The method used purposive sampling technique and snowball sampling, also collecting data with interviews, observation, and documentation. The data analysis method was interactive analysis.

The results showed that SDN 5 Arcawinangun is a school that implements inclusive education and has been used as a pilot school since 2011. Its implementation is quite good related to the MBS perspective and comply with the regulations about inclusive education management, following Law No. 20 of 2003; Permendiknas No. 70 of 2009 consists of 15 articles; Decree of the Regent of Banyumas Regency No. 421/149/2011, also the Decree of Head of the Office (Protap Inclusion) related to inclusion. Besides, there are community and parents who very support the implementation of inclusive education at SDN 5 Arcawinangun. Even so, the implementation of inclusive education at SDN 5 Arcawinangun still experiences several obstacles, such as lacking of human resources, facilities and infrastructure in the form of learning tools for children with special needs. This will impact the needs of students, especially students with special needs, which have not been fulfilled optimally.

Keywords: Management, Inclusive Education, ABK